

ARTIKEL

**PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DILUAR
PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES MAKASSAR**

***OUT OF SETTLEMENT OF TRAFFIC ACCIDENTS
CASES IN LEGAL TERRIORY OF MAKASSAR POLRESTABES***

MAS'UD. L



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2019**



PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DILUAR PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR

Mas'ud L
Universitas Negeri Makassar
Email : masudtato04@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk mengetahui tindak pidana khususnya kecelakaan lalulintas tidak semua harus diselesaikan melalui jalur pengadilan (ii) Untuk mengetahui pertimbangan kepolisian dalam memediasi pelaku dan korban kecelakaan serta mengetahui apakah cara penyelesaian diluar pengadilan berjalan dengan baik (iii) Cara atau metode yang dilakukan petugas (Polisi lalu lintas) untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalulintas diluar Pengadilan.

Penelitian ini adalah penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui, wawancara dan dokumentasi serta analisis data yang dilakukan melalui reduksi data, display data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan (i) Penyelesaian kecelekaan lalulintas diluar pengadilan oleh kepolisian merupakan kecelakaan ringan namun tidak mengakibatkan luka berat bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. (ii) Penyelesaian kecelakaan lalulintas diluar pengadilan oleh kepolisian dianggap lebih baik dan lebih epektif karna memiliki proses yang lebih singkat. (iii) Cara penyelesaian diluar pengadilan adalah P21, SP3, Diversi, ADR.

Kata Kunci: Penyelesaian Kecelakaan, Lalu lintas

ABSTRACT

The objectives of this study are to examine (i) the criminal acts, especially traffic accidents, that should not be resolved through court, (ii) the factors that are considered by the police in mediating the perpetrators and victims of the accidents and whether the out-of-court settlement methods is well implemented in the community, (iii) the methods used by the police officers to resolve traffic accidents cases outside the court.

The study employed descriptive qualitative de research. Data were collected through interviews and documentation. Data were analyzed by conducting data reduction, data display, and data verification.

The results of the study reveal that (i) the out-of-court settlement of traffic accidents by the police is a minor accident but does not cause serious injuries even to the point of losing someone's life , (ii) the out-of-court settlement of traffic accidents by the police is considered as better and more effective because it has shorten process, (iii) the out-of-court settlement is conducted through P21, SP3, Diversion, and ADR.

Keyword: *settlement of accident, traffics*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur dan lancar, Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang undang yang utuh yakni di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada saat ini dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Faktor yang mendominasi kecelakaan berdasarkan catatan data tertentu adalah faktor manusia, hal ini sering diawali oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara atau pengguna

jalan yang mana seringkali tidak mampu mengendalikan emosi dalam berkendara. Selain itu, perilaku Lelah dan mengantuk yang dipaksakan untuk tetap mengemudikan kendaraan juga berkontribusi besar dalam hal penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor faktor lain yang juga mendukung terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan yang tidak layak jalan namun tetap dipaksa untuk beroperasi, begitu pula dengan keadaan jalan yang rusak dari berbagai penyebab kecelakaan diatas maka dimuat dalam data kecelakaan yang tercatat di wilayah Polrestabes Makassar.

Data kecelakaan yang tercatat mulai dari tahun 2016-2018 data laka lantas dan penyelesaian perkara ditahun 2016 berjumlah kasus kecelakaan 1.221 meninggal dunia, 97 luka berat, 7 luka ringan, 1.555 penyelesaian oleh kepolisian melalui pendekatan *ADR* berjumlah 1.101, sisa kasus yang belum terselesaikan 138. Sedangkan data ditahun 2018 mulai dari bulan januari sampai bulan agustus, jumlah kecelakaan yang tercatat di Polrestabes Makassar 1.281, meninggal dunia 71 luka berat 10, luka ringan 1.554, sedangkan kasus yang diselesaikan kepolisian diluar pengadilan menggunakan pendekatan *ADR* 1.283. Sisa kasus yang belum selesai 130, dari data di atas yang menunjukkan angka penyelesaian kasus kecelakaan diluar pengadilan dengan mengedepankan perdamaian musyawara/mufakat antara korban dan pelaku membuat penegak hukum atau kepolisian memungkinkan dan mengesampingkan kepastian hukum.

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Tujuan dari hukum Progresif adalah untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Secara lebih spesifik hukum Progresif antara lain bias disebut sebagai “hukum yang pro-rakyat” dan “hukum yang pro-keadilan”.

Keadilan *restorative justice* ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dalam memenuhi tuntutan tersebut. Keadilan *restorative*

merupakan konsep yang akan diaplikasikan melalui proses nyata. Sehingga untuk dapat kepastian dengan proses pendekatan *restorative*. Pertama, sanksi pidana yang tidak hanya sebagai unsur pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Kedua, pidana itu juga harus memuat unsur pencegahan, rehabilitasi, usaha yang ditunjukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan stigma negatif yang timbul pada diri pelaku. Ketiga, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya mendukung penerapan *restorative justice*.

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpastian atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Karena hak *restitusi* tersebut merupakan bentuk penghargaan dan rasa keadilan bagi korban.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas di selesaikan diluar pengadilan?
2. Apakah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan berjalan dengan baik?
3. Cara atau metode penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas tidak harus menyelesaikan melalui jalur pengadilan.
2. Untuk mengetahui apakah penyelesaian kecelakaan diluar pengadilan berjalan dengan baik, dan diterapkan didalam masyarakat
3. Untuk mengetahui cara atau metode kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan kepada kepolisian dalam pelaksanaan mediasi bagi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas dan umumnya bagi masyarakat. Dalam hal ini, pelaksanaan tersebut dapat membantu kepolisian dan masyarakat paham bahwa membicarakan permasalahan jauh lebih efektif dan mudah daripada menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum atau pengadilan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ataupun kajian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat luas diharapkan mendapatkan pengetahuan, pemanfaatan, serta dalam berlalu lintas untuk menjadi Warga Negara yang patuh dan tertib dalam berlalu lintas.
- b. Bagi petugas (Polisi lalu lintas) sebagai informasi agar meningkatkan pengawasan dan proses penertiban lalu lintas serta unsur-unsur yang terkait.
- c. Bagi peneliti sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian serta sebagai salah satu upaya untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam menulis karya ilmiah terutama pada bidang yang diteliti.
- d. Bagi pembaca yaitu untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang yang diteliti dan dapat menjadi referensi dan acuan yang akan digunakan jika hendak melakukan penelitian lebih lanjut untuk bidang yang serupa.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan mengenai yang dimaksud dengan tindak pidana. Tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, dimana pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas legalitas sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “Pasal 1 ayat (1) “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada”. Olehnya itu, suatu perbuatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dipidana.

Tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *Verbrechen* atau *Misdad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau kriminologis. Sedangkan menurut Simon, (Adami Chazawi, 2011: 129)

Bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Semua perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum menjadi pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana, suatu pelanggaran hukum disebut perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, pelanggaran hukum itu, untuk hukum pidana, memuat anasir melawan hukum (*element van wederechtheid*). Diantara hukum itu, ada beberapa yang diancam dengan hukuman (pidana) yaitu diancam dengan sanksi istimewa, pelanggaran hukum semacam ini yang oleh KUHPidana kualifikasi peristiwa pidana (*strafbaar feit*)

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Pompe, pengertian melawan hukum formal dan materil, dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*) jadi bertentangan dengan hukum., bukan dengan undang-undang. Dengan demikian, Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang kita maksud dengan “melawan hukum materil”, sedangkan melawan hukum secara formal diartikan bertentangan dengan undang-undang. (Zainal Abidin Farid, 2007: 242)

Sebelum seseorang ditetapkan tersangka oleh kepolisian, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam perbuatannya sehingga disebut “melawan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Sengaja (Opzet)

Menurut Utrecht dalam *criminal wetbook* Nederland tahun 1809, sengaja (*Opzet*) adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. (Zainal Abidin Farid, 2007:266)

2. Kealpaan dan Kelalaian

Menurut Van Hamel bahwa *culpa lata* mengandung dua syarat yaitu:

- a) Tidak mengadakan dugaan-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b) Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- c) Kelalaian dan kealpaan dapat juga menyebabkan orang lain meninggal, luka-luka berat maupun ringan.

3. Dapat Dipertanggungjawabkan

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu:

- a) Dapat dipertanggungjawabkan pembuat
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya *sengaja* atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya mempertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat (Andi Hamzah, 2008:130)

Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- a) Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya
- b) Mengerti tujuan nyata pembuatnya
- c) Sadar bahwa itu tidak diperkenankan oleh masyarakat (Andi Hamzah, 2008 :149)

Dari penjelasan di atas telah memperkuat bahwa meskipun unsur kesengajaan tidak terpenuhi tetapi karena kelalaian seseorang menyebabkan orang lain mengalami kerugian dan atau luka-luka dan meninggal dunia maka bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan tindak pidana.

C. Perencanaan dan Manajemen Lalu Lintas

Perencanaan dan Manajemen lalu lintas sangat diperlukan dalam rangka terciptanya masyarakat tertib lalu lintas. Manajemen lalu lintas dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan. Ada beberapa teknik untuk menentukan lintasan yang akan dibebankan pada perjalanan-perjalanan di antara zona yaitu:

1. Teknik-Teknik Lintasan Minimum yang didasarkan pada pengandaian bahwa mereka yang melakukan perjalanan diantara dua titik keinginan menggunakan rute dengan hambatan minimum.
2. Lintasan Minimum dengan Batasan Kapasitas yaitu teknik-teknik membatasi kapasitas didasarkan pada temuan bahwa begitu arus lalu lintas naik, kecepatannya menurun. Di dalamnya terdapat hubungan antara hambatan dan arus untuk semua jenis jalan raya. (Nasution, M.N, 1996: 195-196)

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan:

1. antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda.
2. Penetapan Usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan dan jaringan jalan.
3. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu.

4. Penyesuaian sirkulasi, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. (Rahardjo Adisasmita. 2011: 105)

D. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelanggaran berasal dari kata “langgar” dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung arti tempat beribadah, tubruk, laga, landa. “melanggar artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda, “pelanggaran” artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan dari” Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan.

E. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

1. Bentuk-Bentuk pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas serta ketentuan pidana.

F. Penyelesaian kecelakaan Lalu Lintas di Luar Kantor Pengadilan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (UU, No 1, 2012: Pasal 1 angka 6)

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain (Bambang Waluyo :109)

a. Menurut Howard Zehr

Keadilan restoratif adalah Proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi

serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

2. Macam-macam Bentuk *Restorative Justice*

Pada suatu proses *restorative*, kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini. Di beberapa negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana (Rufinus Hitmaulana Hutaaruk, 2014: 264).

Bentuk atau variasi penerapan *restorative justice* merupakan praktik yang sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan. Bentuk praktik *restorative justice* yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand, dimana bentuk ini dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* di beberapa negara yaitu, *Victim Offender Mediation*, *Conferencing/Family Group Conferencing*, *Circles* dan *Restorative Board/Youth Panels*.

3. Prinsip dan Nilai Dasar *Restorative Justice*

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu:

- a. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekadar pelanggaran pidana.
- b. *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara.
- c. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial
- d. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial (Bambang Waluyo, 2016: 158)

G. Dasar Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas

Penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas adalah suatu proses yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan melalui proses peradilan maupun diluar proses peradilan. Setiap perkara pada setiap kecelakaan lalu lintas harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang realistik yang terjadi pada "Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan", khususnya bagi masyarakat dan pihak kepolisian secara mendalam, guna menghasilkan data deskriptif bersifat uraian kata-kata atau makna-makna tertulis dari orang-orang atau responden yang diteliti dan dapat dipercaya serta memilih informan dari kepolisian yang memiliki pengetahuan lebih terhadap lalu lintas jalan. Mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dokumen terkait kecelakaan yang pernah terjadi di wilayah hukum Polresta Makassar. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. dengan maksud agar dapat mendeskripsikan dan menginterpretasikan data dalam keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkap fakta.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polresta Makassar. Dalam penelitian ini pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive*

(sengaja) yaitu ditetapkan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah Interview (wawancara) dan dokumentasi. Kedua teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara)

Interview (Wawancara) yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan yaitu Satuan lalulintas (Satlantas) dan kanit laka lantas yang bertugas menangani langsung kecelakaan di jalan, penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas dan cara penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas yang dimediasi oleh kepolisian terhadap pelaku dan korban kecelakaan untuk menyelesaikan permasalahan dari kedua belapihak secara kekeluargaan tanpa melalui proses pengadilan.

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, instrumen ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat dan sebagainya. Wawancara memiliki sifat yang luwes, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan subyek sehingga segala sesuatu yang ingin diungkap dapat digali dengan baik. Wawancara terbagi atas dua jenis yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Dalam wawancara berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada subyek telah ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen data angka kecelakaan dan penyelesaian kecelakaan lalulintas di luar pengadilan data ini merupakan data yang tertulis dan menjadi arsip oleh kepolisian laka lantas polrestabes Makassar pada saat menangani kecelakaan sampai memediasi pelaku dan korban kecelakaan. Peneliti mengambil data yang relevan dengan penelitian dan pengambilan gambar dan saat wawancara kepada informan.

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan

data-data yang berupa dokumen baik dokumen tertulis maupun hasil gambar. Menurut Riyanto bahwa dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang barang tertulis, dokumentasi juga bisa berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data data yang sudah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian kasus tindak pidana khususnya kecelakaan lalulintas yang diselesaikan diluar pengadilan

Penyelesaian kecelakaan lalulintas ketika terjadi kecelakaan, polisi dalam hal ini menjadi mediator atau wadah penengah diantara kedua belah pihak, kepolisian dalam menyelesaikan kecelakaan melihat dan mencermati kasusnya terlebih dahulu apa bila kecelakaannya hanya berupa kecelakaan ringan yang hanya mengakibatkan kerusakan ataupun luka, tapi hanya luka goresan maka dalam hal ini kepolisian melakukan tindakan dengan cara mengupayakan kasus ini bisa di bicarakan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak, bila mana kedua belah pihak menghendaki kasusnya di mediasi maka kedua belah pihak bernegosiasi terlebih dahulu bagaimana pelaku dalam hal ini ketika ingin menanggung segala buntut kerusakan atau kerugian yang di akibatkan kelalaiannya maka pelaku menawarkan berapa besaran kerugian yang harus di tanggung nya , ketika korban dalam hal ini sepakat atas pemberian dan menerima segala bentuk pemberiannya maka kedua belah pihak menuliskan dalam bentuk perjanjian di atas kertas dan di bubuhi materai demi mendapatkan kekuatan hukum atas perjanjian dan di tandatangi oleh kedua belah pihak dan kepolisian juga ikut bertandatangan sebagai pihak yang mengetahui perjanjian dan kesepakatan tersebut.

2. Penyelesaian kasus kecelakaan lalulintas di luar pengadilan berjalan dengan baik.

Penyelesaian diluar pengadilan merupakan cara penyelesaian perbuatan melawan hukum atau tindak pidana khususnya kecelakaan lalulintas dirasa lebih baik dan lebih efektif dibanding menyelesaikan permasalahan melalui proses pengadilan, kebiasaan si masyarakat ini nampaknya juga di apresiasi oleh kepolisian sehingga di buat aturan yang sejalan dengan

kebiasaan masyarakat dalam hal ini Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yaitu pada pasal 14 poin f bahwa “Penerapan Konsep Alternative Dispute Resolution

3. Cara atau metode penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan

Kesepakatan Dalam kasus penyelesaian kecelakaan lalu lintas poin penting yang harus dicapai terlebih dahulu adalah menyepakati permasalahan ini diselesaikan dalam bentuk musyawarah atau secara kekeluargaan dalam hal ini permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak melakukan pembicaraan yang melibatkan pelaku dan korban, atau keluarga pelaku dan keluarga korban, yang di saksi oleh kepolisian untuk duduk bersama, dalam hal menyepakati hal hal yang dianggap menjadi kerugian yang di derita oleh keduanya (pelaku, korban)

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian kecelekaan lalu lintas diluar pengadilan oleh kepolisian terlebih dahulu dikehendaki oleh kedua belah pihak, sehingga kepolisian dalam melakukan mediasi dengan mudah menyelesaikan persoalan antara kedua belah pihak, kecelakaan yang bisa di selesaikan atau dimediasi langsung oleh kepolisian adalah kecelakaan ringan dan tidak mengakibatkan luka berat bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang.
2. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan oleh kepolisian dianggap lebih baik dan lebih efektif karna memiliki proses yang lebih singkat, biaya yang lebih sedikit dan yang terpenting adalah kedua belah pihak lebih cepat dalam melakukan perdamaian dan saling memaafkan lalu mengakui kesalahannya.
3. Cara penyelesaian yang biasa di tempuh oleh kepolisian dalam menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan adalah P21, SP3, Diversi, ADR.

B. Saran

Dari kesimpulan penelitian, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pimpinan kepolisian untuk mengintruksikan kepada anggota dilapangan bila mana menemukan dan mendapatkan laporan kejadian kecelakaan ringan kepolisian menjadi mediator dalam melakukan penyelesaian melalui musyawarah tanpa melalui proses pengadilan.
2. Diharapkan kepada kepolisian lebih cermat melihat masalah kecelakaan lalu lintas yang seharusnya dapat diselesaikan secara singkat tanpa melibatkan pihak-pihak tertentu atau pengadilan.
3. Diharapkan kepada pembuat kebijakan menjadikan P21, SP3, Diversi, ADR, menjadi aturan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)* Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Jakarta: Kencana,
- Adami Chazawi, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dansosiologis)* Jakarta: Chandra Pratama
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: SinarGrafika.
- Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang:Pustaka Magister.

Darwis Rahim. 1988 *kesadaran Berlalu-lintas*, Jakarta: Pradya Paramita

Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justisiabale di dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Inonesia,

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

Nasution, M.N. 1996, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Rahardjo Adisasmita. 2011, *Manajemen Transportasi Darat*. Jakarta. Graha Ilmu.

Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Djabatan.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung Alfabeta.

Utrech/Moh. Saleh Djinjang, 1989, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta :Sinar Harapan.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana*, Jakarta : sinar Grafika,

B. Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta:Majelis Permusyawaratan Rakyat

Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, 2013. Surabaya: Kesindo Utama

C.Jurnal dan Dokumen

Barda Nawawi Arief, *Makalah Seminar Nasional PendekatanNon Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan: Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996, hlm. 2.

Heru Susetyo dkk, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Musakkir, “*Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.19, Nomor 3 September 2011, hlm.214- 215.

Yuniar Ariefianto, 2014, “*Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang,

D.Internet

United Nation. 2000. *Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes InCriminalMatters*. ECOSOC. <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters> diakses 1 oktober 2018

United Nations Office on Drugs and Crime. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. UnitedNation. NewYork. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5059b7d1c3d3c/kabareskrim--diskresi-polisi-harus-dibatasi> diakses 3 oktober 2018